

## MODALITAS CALON ANGGOTA DPRD BERDASARKAN JENIS KELAMIN (STUDI DI PARTAI GOLKAR, PKB DAN PDIP) DAPIL 1 PROVINSI LAMPUNG

Handi Mulyaningsih<sup>1)\*</sup>

<sup>1)</sup>Jurusan Sosiologi, Universitas Lampung

\*Corresponding authors: (email) [handi.mulyaningsih@fisip.unila.ac.id](mailto:handi.mulyaningsih@fisip.unila.ac.id)

---

### ABSTRAK

Affirmasi belum berhasil meningkatkan keterwakilan di lembaga legislatif. Pada tahun 1999 prosentase perempuan di DPR hanya 9,0 %, pada pemilu 2004 mencapai 11,24 %; pada tahun 2009 menjadi 18 %; tahun 2014 mencapai 17,32%; dan 20,52% pada pemilu 2019. Mengapa sulit bagi perempuan untuk menjadi anggota legislative? Penelitian ini mendeskripsikan modalitas perempuan dan laki-laki calon anggota DPRD Lampung di daerah pemilihan I Kota Bandar Lampung. Penelitian difokuskan di partai Golkar, PKB dan PDIP. Data diolah dengan cara mengklasifikasikan, mempresentase, serta membandingkan data antara laki-laki dan perempuan. Data dianalisis dengan pendekatan gender mainstraming pada dimensi Akses, Kontrol dan Partisipasi laki-laki dan perempuan pada aspek modal ekonomi, politik dan social. Namun analisis tidak membandingkan modal social, politik dan ekonomi perempuan dan laki-laki antara partai satu dengan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan perolehan suara perempuan dan laki-laki ditentukan modal sosial, ekonomi dan politik. Apabila ke tiga modal tersebut tinggi maka perolehan suaranya tinggi. Apabila calon laki-laki dan perempuan tidak memiliki modal politik, social, ekonomi maka perolehan suaranya rendah. Jadi tidak benar bahwa karena laki-laki maka perolehan suaranya tinggi, sebaliknya karena perempuan maka perolehan suaranya rendah. Faktor yang menyebabkan perempuan suaranya rendah adalah rendahnya modalitas politik, social dan ekonomi. Jadi modalitas itu yang harus ditingkatkan.

**Kata Kunci:** petunjuk penulisan, jurnal pengabdian, template artikel

### ABSTRACT

*Affirmations have not succeeded in increasing representation women in the legislature. In 1999 the percentage of women in the DPR was only 9.0%, in the 2004 election 11.24%; in 2009 to 18%; in 2014 was 17.32%; and 20.52% in the 2019. This study describes the modalities of women and men candidates for members of DPRD Lampung in the electoral district I of Bandar Lampung. City. The data is processed by classifying, presenting, and comparing between men and women. The data were analyzed using the gender mainstreaming approach the aspects of economic, political and social capital. The research show that the vote acquisition of women and men is determined by social, economic and political capital. If the three capitals are high, then the vote acquisition is high. If both male and female candidates do not have political, social and economic capital, the vote acquisition will be low. So it is not true that because it is a man, the vote gain is high, and because it is a woman, the vote gain is low. The factor that causes women's votes to be low is the low political, social and economic modality.*

**Keywords:** *template; community service journal; article*

## PENDAHULUAN

Indonesia melakukan perubahan politik secara mendasar tahun 1998, melalui amandemen UUD 1945 yang dimaksudkan untuk memperkuat proses demokratisasi. Di bidang politik, pemberlakuan UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu dimaksudkan untuk mengganti system pemilu dari pemilu yang proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Juga diatur tentang aksi afirmasi (*affirmative action*) agar perempuan semakin meningkat representasinya di dalam lembaga perwakilan rakyat, serta di kepengurusan partai politik.

Pada Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 *affirmative action* diimplementasikan melalui pengaturan dimana wajib bagi setiap partai politik untuk mengisi daftar calon minimal 30 persen perempuan (DCT). Upaya ini masih mengalami kegagalan dalam menambah perempuan menjadi anggota legislative hingga 30%. Namun aturan ini patut diapresiasi karena meningkatkan jumlah perempuan di dalam pencalonan.

Tabel di bawah ini menjelaskan jumlah keterwakilan perempuan di DPR sejak pemilu 1971-2019.

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan di DPR RI Tahun 1955-2019

Periode	Perempuan		Laki-laki	
1971-1977	36	(7,8%)	460	(92,2%)
1977-1982	29	(6,3%)	460	(93,7%)
1982-1987	39	(8,5%)	460	(91,5%)
1987-1992	65	(13%)	435	(87%)
1992-1997	62	(12,5%)	438	(87,5%)
1997-1999	54	(10,8%)	446	(89,2%)
1999-2004	46	(9%)	454	(91%)
2004-2009	65	(11,6%)	435	(87%)
2009-2014	101	(18%)	459	(82%)
2014-2019	97	(17,3%)	463	(82,7%)
2019-2024	118	(20,5%)	457	(79,5%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 dan 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang signifikan antar jenis kelamin, dimana jumlah perempuan sangat rendah dibandingkan laki-laki sebagai anggota DPR. Kesenjangan tersebut semakin menurun seiring dengan kebijakan *affirmative action*, namun hingga pemilu 2019-2024, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR belum mencapai 30%. Dengan kata lain, tingkat

kegagalan perempuan calon anggota legislative sangat tinggi (sekitar 10% pada pemilu tahun 2019-2024); 12,7% pada pemilu tahun 2014-2019; dan seterusnya dengan kecenderungan semakin tinggi.

*Affirmativ action* telah membuka akses bagi perempuan untuk mencalo calon anggota legislative. Namun hasil penelitian menunjukkan masih ada hambatan psikologis, konstruksi sosial budaya yang menyulitkan perempuan untuk berpolitik; perempuan belum berani menerobos batas patriarkhi berupa ijin suami; bagi yang sudah menjadi anggota legislative belum menunjukkan kemampuannya dalam menyelesaikan persoalan yang sensitive gender dan belum menampakkan sebagai representasi perempuan Indonesia (Sulastri, 2020). Penelitian tentang hambatan budaya patriarkhi dalam keterpilihan perempuan telah banyak dilakukan. Termasuk studi komparasi Indonesia dengan Korea, bahwa meski Korea telah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender namun belum dapat mengatasi hambatan patriarki (Syafputri, 2017). Penelitian lainnya Boro & Kale (2020) menunjukkan calon perempuan hanya mengandalkan tim sukses untuk turun lapangan, dan tidak memanfaatkan organisasi di akar rumput yang mendukung kompetisinya dengan caleg laki-laki. Juga minimnya dukungan media dalam mempromosikan perempuan sebagai caleg. (Taufik, 2018).

Meskipun belum mencapai harapan (30%) namun semakin banyak perempuan menjadi anggota legislative. Selama ini banyak penelitian yang menyebutkan kegagalan perempuan menjadi anggota legislative karena budaya patriarkhi. (Alip, 2016; Taufik, 2018; Boro & Kale, 2020; Putri & Fatmariza, 2020). Penelitian juga menunjukkan keberhasilan perempuan sebagai anggota legislative (bahkan semakin meningkat jumlahnya) menunjukkan bukan karena kodrat sebagai perempuan maka perempuan gagal menjadi anggota legislative. Hasil penelitian Ramadhani & Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa *affirmatif action* tidak otomatis membuat perempuan terpilih sebagai anggota legislative, namun selama habitus, medan dan modalitasnya dikuasai laki-laki maka perempuan sulit berhasil dalam politik (Ramadhani & Rahmawati, 2020). Hasil penelitian juga menunjukkan keterpilihan bupati Lampung Timur karena memiliki modal social, ekonomi, politik (Hertanto & Mulyaningsih, 2017); modalitas dan profesionalitas tim pemenangan (Efendi, n.d.)

Penelitian ini akan mendeskripsikan aspek modalitas baik modal politik, ekonomi dan social baik calon laki-laki dan perempuan yang memberikan kontribusi bagi perolehan suara yang diperoleh calon. Penggunaan pendekatan gender mainstreaming akan menjadi pembeda penelitian ini dengan yang sebelumnya.

## KAJIAN PUSTAKA

Jenis kelamin, apakah benar secara kodrati telah dibedakan status dan perannya. Teori *nurture* dan *nature* merupakan teori yang banyak digunakan untuk membahas hal itu. Teori *nature* menjelaskan perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan itu alamiah atau biologis. Perempuan alamiahnya hamil, melahirkan, dan menyusui, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan perempuan terkait dengan biologisnya (Purnomo, 2019).

Kegiatan-kegiatan kerumahtanggaan seperti mengurus anak, membersihkan rumah, mencuci baju, seringkali dianggap sebagai kodrat perempuan. Padahal kegiatan tersebut dapat dipertukarkan (Islam Ats-Tsauri, 2020). Pada jaman dulu pekerjaan rumah tangga yang dianggap kodrat, tabu dilakukan laki-laki. Namun pada saat ini laki-laki melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan berbayar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran-peran yang semula dianggap kodrati ternyata bukan kodrati (Shintya, 2009); (Pratiwi & Wiyanti, 2017). Hal ini disebabkan terjadinya perubahan social karena Industrialisasi memaksa perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan di luar rumah tangga. (Astuti, 2022).

Perubahan tersebut belum diterima semua pihak, sebagian perempuan masih mempertimbangkan munculnya konflik karena bekerjanya perempuan di luar rumah mengakibatkan perubahan distribusi pekerjaan di dalam rumah tangga (Marsella & Afrizal, 2022). Pada akhirnya, perempuan terpaksa berbeban ganda, apabila tidak ada kesadaran untuk berbagi beban antara laki-laki dan perempuan (Ainul Luthfia et al., 2021). Meskipun perempuan yang bekerja di luar rumah itu memperoleh persetujuan dari laki-laki namun peran ganda tetap terjadi (Puspitarini & Femilia, 2018).

Teori *nurture* menyebutkan bahwa perbedaan peran dan status perempuan dan laki-laki disebabkan konstruksi budaya. Perempuan distereotipkan tidak

rasional, emosional, lemah dan sebagainya. Sebaliknya laki-laki kuat, rasional, dan sebagainya. Konstruksi sosial tersebut diberi nama gender. Konstruksi social tersebut berdampak pada terciptanya perempuan sebagai obyek pengambilan keputusan dari laki-laki. Konstruksi social tentang perempuan yang tidak rasional, dan selalu emosional menyebabkan perempuan hanya sebagai penerima keputusan. Perempuan yang berciri tersebut akhirnya tidak cocok berada di ruang politik yang penuh kekerasan, persaingan dan konflik (Kiftiyah, 2019).

Para feminis Islam menegaskan kalau konstruksi yang bias gender itu karena tafsir- tafsir yang membenci perempuan diyakini sebagai kebenaran agama Islam. Padahal diciptakannya manusia adalah untuk saling setara, memahami dan menghormati bukan untuk menyakiti. Untuk menggapai kesetaraan pada jenis kelamin dibutuhkan kajian ajaran Islam (Muqoyyidin, 2013); serta tafsir Al-Qur'an ataupun hadits yang bias gender. Pejuang kesetaraan gender Amina Wadud (Dewi, 2013) menyatakan bahwa ketidakadilan gender disebabkan penafsiran al-Qur'an para ulama tradisional yang pemikirannya diwarnai kultur patriarki. Padahal prinsip dasar dan spirit al-Qur'an tidak membedakan perempuan dan laki-laki. un prinsip-prinsip dan spirit relasi laki-laki dan perempuan terdistorsi karena yang tafsir yang patriarki (Nuraini, 2019). Amina Wadud menegaskan seorang mufassir haruslah memiliki worldview. Menurut Fatima Mernissi, konsep persamaan laki-laki dan perempuan didasari nilai-nilai dalam nash, sedangkan marginalisasi perempuan dalam kehidupan publik merupakan konstruksi social (Afif et al., 2021). Sehingga kesetaraan gender b e r m a k n a kesamaan kondisi antara laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama di berbagai aspek kehidupan sehingga perempuan memiliki kebebasan untuk memasuki sector tersebut (Saputra et al., 2021).

Gender yang menciptakan kesenjangan gender tersebut muncul pada masyarakat yang budayanya patriarkhi. Budaya tersebut memposisikan laki-laki sebagai makhluk yang utama di dalam pengamblan keputusan. Budaya ini terbukti merugikan perempuan karena banyak keputusan yang tidak memberikan manfaat bagi perempuan. Banyak regulasi dan kebijakan yang tidak bermanfaat bagi perempuan itu disebabkan rendahnya perempuan di Lembaga- lembaga politik yang berperan di dalam menyusun regulasi. Sedangkan laki-laki yang berada di dalam

pengambilan keputusan pada masyarakat patriarkhi bisa jadi tidak berpihak pada perempuan.

*Affirmatif action* merupakan metode yang dipergunakan untuk mensiasati terbukanya akses, meingkatnya control perempuan pada ranah politik yang masih terbatas karena budaya patriarkhi. Keterbatasan akses perempuan dalam akan berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan di dalam politik. Agar partisipasi politik meningkat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan keluarga. Upaya untuk menurunkan kuatnya budaya patriarkhi juga dilakukan dengan pembangunan yang ditujukan untuk menurunkan kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi hambatan internal dan eksternal perempuan dalam partisipasinya di bidang politik (Fauziyah, 2020).

Menurut Bourdieu dibutuhkan modal untuk menang dalam persaingan yaitu modal budaya, sosial, ekonomi dan simbolik yang semuanya berhubungan saling pengaruh mempengaruhi. Modal social adalah modal berupa jaringan ke dalam maupun keluar partai, jaringan batih, dominasi di masyarakat, dan pemimpin lembaga. Modal social ini signifikan pada keberhasilan. Modal Politik (*political capital*) berupa pengalaman memimpin masyarakat, kapasitas mengontrol public publik, *track record*, tersohor, incumbent. Modal ekonomi (*economic capital*) berupa ketersediaan dana pribadi maupun pihak-pihak lainnya. Modal simbolik (*symbolic capital*) berupa posisi seseorang di masyarakat. (Ramadhani & Rahmawati, 2020).

## **METODE**

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Data penelitian merupakan data sekunder dari KPU dan BPS, serta wawancara dengan informan anggota DPRD yang berhasil menjadi anggota DPRD Lampung. Data diolah dengan cara mengklasifikasikan, mempresentase, serta membandingkan data antar jenis kelamin. Data dianalisis dengan pendekatan *gender mainstreaming* pada dimensi Akses, Kontrol dan Partisipasi laki-laki dan perempuan pada aspek modal ekonomi, politik dan social. Namun analisis tidak membandingkan modal social, politik dan ekonomi perempuan dan laki-laki antara partai satu dengan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Upaya untuk membangun budaya yang setara gender, salah satunya dilakukan dengan meningkatkan IPG pada komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi ketenagakerjaan. Sebenarnya IPG merupakan indikator Indeks Pembangunan Manusia yang disempurnakan dengan memasukkan unsur jenis kelamin. Dengan membandingkan hasil pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan maka terlihat kondisi kesenjangan gendernya. Apabila kesenjangan tinggi maka diasumsikan bahwa budaya patriarki masih kuat pengaruhnya sehingga pembangunan tidak mampu meningkatkan akses, control perempuan dalam memasuki ruang-ruang pembangunan. Akibatnya perempuan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sejak IPG Indonesia membaik (di atas 90), semakin meningkat representasi perempuan di DPR. Pada tahun 2004, IPG masih sangat rendah yaitu 63,94; tahun 2009 meningkat menjadi 89,42; tahun 2014 menjadi 90,34; tahun 2019 menjadi 91,06. Peningkatan IPG itu diikuti dengan peningkatan representasi perempuan di DPR yang pada tahun 2004 hanya 65 orang (11,6%), tahun 2009 mencapai 101 perempuan (18%), tahun 2024 mencapai 97 orang (17,3%), pada tahun 2019 mencapai 118 orang (20,5%).

Peningkatan IPG itu bermakna bahwa kesenjangan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi semakin menurun. Kesetaraan pendidikan antar jenis kelamin bermakna terbukanya wawasan berfikir yang membuat perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Pola pikir yang semula menganggap perempuan tidak perlu bersekolah telah mengalami perubahan sehingga perempuanpun tidak lagi selalu berada di rumah sebagai “konco wingking” . Kesetaraan dalam pendidikan juga mengubah perilaku ekonomi dari perempuan sebagai pencari nafkah tambahan menjadi pencari nafkah yang tidak boleh dibedakan upahnya. Akses perempuan untuk bekerja di luar rumah di segala sector sudah terbuka. Bekerja dan tidak bekerja merupakan pilihan yang patut dihormati, bukan karena pemaksaan namun karena perempuanpun memiliki hak untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Menguatnya perempuan dalam mengambil keputusan akan meningkatkan kesehatan perempuan.

Perlu diperhatikan bahwa aspek pendidikan itu berpengaruh pada partisipasi politik (Talaohu, 2022). Perempuan yang berpendidikan tinggi dan usianya sudah dewasa memiliki kesadaran politik lebih tinggi dibanding perempuan yang berpendidikan tinggiamun masih muda usia (Salsabila & Nurmina, 2022). Selain pendidikan, factor pendapatan keluarga juga memberikan kontribusi terhadap partisipasi politik sebesar 57% (Laia et al., 2021). Kondisi itu juga berlaku dalam kesehatan, bahwa usia harapan hidup yang seimbang antar jenis kelamin dan perempuan akan memberikan kontribusi pada keseimbangan partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan.

Terkait dengan diskripsi di atas, di tingkat local dijelaskan kontribusi IPG terhadap peningkatan representasi perempuan.

Tabel 2. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik dan IPG Kabupaten/Kota di Lampung

Provinsi/Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan dalam Politik	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Keterlibatan Perempuan dalam Politik
	2020	2020	2014	2014
<b>LAMPUNG</b>	20,00	90,33	89,62	14,12
LAMPUNG BARAT	17,14	92,95	91,54	2,5
TANGGAMUS	6,67	91,13	89,61	17,78
LAMPUNG SELATAN	10,20	89,600	88,82	10
LAMPUNG TIMUR	12,00	88,83	87,42	10
LAMPUNG TENGAH	12,00	89,87	88,99	4,00
LAMPUNG UTARA	13,33	89,46	87,69	6,67
WAY KANAN	10,00	88,190	87,45	15
TULANGBAWANG	20,00	89,31	87,39	15,56
PESAWARAN	24,44	87,200	85,33	
PRINGSEWU	30,00	92,33	85,33	27,5
MESUJI	22,86	84,170	83,36	14,29
TULANGBAWANG BARAT	3,33	88,56	87,42	6,67
PESISIR BARAT	4,00	93,21	92,18	7,1

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023

Mencermati tabel di atas, Kabupaten yang representasinya cukup tinggi yaitu Pringsewu (30%), Kota Metro ( 28%), Pesawaran (24,44( 22%), Mesuji (22,86%), Tulang Bawang (20%), Lampung Barat (17,14%). Selebihnya

diklasifikasikan rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa kabupaten Pringsewu, Kota Metro, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Mesuji, Tulang Bawang tersebut Indeks Pembangunan Gendernya tinggi.

Di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2014 IPG nya tinggi yaitu 91,54%, lalu meningkat menjadi 92,95%. Artinya kesenjangan gender pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berkurang. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan prosentase keterwakilan di DPRD kabupaten Lampung Barat.

Untuk Kabupaten Lampung Selatan yang IPG-nya masih rendah namun terjadi peningkatan dari IPG 88,82 tahun 2014 menjadi 89,6 telah sedikit meningkatkan keterwakilan perempuan dari 10% menjadi 10,2%. Kecilnya peningkatan ini karena IPG nya masih dalam taraf rendah (belum mencapai 90), artinya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi ketenagakerjaan, masih tinggi. Rendahnya IPG di Kabupaten Lampung Timur sebesar 87,42 tahun 2014 yang sedikit meningkat menjadi 88,83 pada tahun 2019, telah sedikit berdampak pada kenaikan jumlah perempuan anggota legislative tahun 2019. Namun, di Kabupaten Lampung Tengah, meskipun IPG nya pada tahun 2014 rendah yaitu 88,09 dan meningkat menjadi 89,87, namun mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari empat persen menjadi 12%. Rendahnya IPG Kabupaten Lampung Utara tahun 2014 sebesar 87,69 menjadi 89,46 berdampak kenaikan representasi perempuan dari 6,67% menjadi 13,33%. Untuk kabupaten Tulang Bawang yang IPGnya 87,39 pada tahun 2014, meningkat menjadi 89,31 di tahun 2019, kenaikan representasi perempuannya meningkat dari 15,56% menjadi 20%.

Di Kabupaten Pringsewu yang IPG nya meningkat signifikan dari rendah yaitu 85,33 menjadi tinggi sebesar 92,33 (lebih dari 90) pada tahun 2019 telah berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dari 27,5% menjadi 30%. Yang unik, pada IPG Kabupaten Mesuji termasuk rendah dimana tahun 2014 hanya 83,36 dan tahun 2019 masih rendah yaitu 84,170 namun keterwakilan perempuannya sebesar 14,29% tahun 2014 meningkat menjadi 22,86%. Keunikan ini perlu dilakukan penelitian yang mendalam.

Untuk Kota Metro yang IPG tinggi yaitu 94,61 pada tahun 2014, meningkat menjadi 95,55, keterwakilan perempuannya meningkat tajam yaitu 10% menjadi

22%. Untuk Kota Bandar Lampung, IPG tahun 2014 sebesar 93,25 meningkat menjadi 93,86. Keterwakilan perempuannya 28% pada tahun 2014, pada tahun 2019 juga 28% . Ini menunjukkan bahwa IPG tinggi di daerah perkotaan memiliki kecenderungan menurunnya budaya patriarkhi.

Di Kabupaten Tulang Bawang Barat, data menunjukkan adanya peningkatan IPG namun jumlah representasi perempuan justru menurun. Hal ini sama dengan yang terjadi di Way Kanan dimana IPG meningkat namun keterwakilan perempuan menurun. Kejadian seperti di Way Kanan, Tulang Bawang juga terjadi di Tanggamus. Jadi terdapat 6 kecenderungan dampak kenaikan IPG terhadap peningkatan atau penurunan representasi perempuan. Jadi terdapat tiga kondisi tersebut yaitu IPG naik-representasi perempuan naik; IPG naik namun representasi turun; IPG naik namun representasi tetap, menunjukkan bahwa terdapat kekuatan patriarkhi yang berbeda. Kekuatan patriarkhi dapat menurun dalam kondisi perkembangan masyarakat yang semakin tinggi kualitasnya pada sector ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

### Modal Sosial, Ekonomi, Politik Calon Berdasarkan Jenis Kelamin

Upaya untuk menurunkan pengaruh patriarkhi telah dilakukan dengan menurunkan kesenjangan gender di dalam pembangunan melalui peningkatan IPG. Lalu pemerintah juga menerapkan *Affirmatif action*, telah memberikan peluang bagi perempuan di dalam pencalonan anggota legislative minimal 30% di setiap partai politik di setiap daerah pemilihan. Namun data menunjukkan bahwa kemenangan calon perempuan untuk mengisi representasi dalam keterpilihan di lembaga legislative ternyata masih belum sesuai harapan. Di bawah dideskripsikan data modal sosial, ekonomi dan politik di Dapil 1 DPRD Provinsi Lampung di 3 partai yaitu Golkar, PKB dan PDIP.

Tabel 3. Modal Sosial, Ekonomi, Politik Laki-Laki dan Perempuan Calon Anggota DPRD Partai Golkar Dapil 1 DPRD Lampung 2019

No Urut	Jenis Kelamin	Jumlah suara	Modal Politik			Modal Ekonomi			Modal Sosial		
			X1	X2	X3	X1	X2	X3	X1	X2	X3
1	L	5736	√			√			√		
2	L	8520	√			√			√		
3	P	3310	√			√			√		
4	P	2048	√			√				√	

5	P	869	√				√			√
6	P	4456	√			√			√	
7	L	927			√		√			√
8	L	1097			√		√		√	
9	P	427			√	√				√
10	L	568								
11	L	454			√		√			√

Sumber Data: KPU Provinsi, diolah tahun 2023

Keterangan: X1 tinggi, X2 sedang; X3 rendah

Modal para calon di partai Golkar dipetakan tinggi, sedang, rendah. Modal politik diklasifikasikan tinggi apabila calon tersebut merupakan kader utama partai, sedang apabila kader tengahan partai, dan rendah apabila bukan kader partai. Modal ekonomi diklasifikasikan tinggi apabila calon memiliki pekerjaan, sedang apabila calon sudah tidak bekerja, rendah apabila calon tidak bekerja. Modal sosial tinggi apabila calon berpendidikan tinggi dan aktif dalam banyak organisasi sosial kemasyarakatan, sedang apabila calon berpendidikan tinggi namun tidak banyak beraktivitas di organisasi sosial kemasyarakatan, rendah calon berpendidikan rendah dan tidak aktif di organisasi sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan tabel di atas maka ada beberapa variasi keberhasilan calon untuk meraih suara sesuai dengan modal yang dimiliki di partai Golkar:

1. Ada kecenderungan calon yang memiliki modal politik, ekonomi dan sosial tinggi perolehan suaranya tinggi.
2. Meskipun perempuan berada di urutan 3 dan 6, apabila ke tiga modal tersebut tinggi maka perolehan suaranya tinggi meskipun tidak memperoleh kursi.
3. Perempuan yang modal politiknya tinggi namun modal ekonomi dan sosialnya rendah maka perolehan suaranya rendah.
4. Laki-laki sekalipun yang modal ekonominya tinggi namun sumberdaya politik dan sosialnya rendah maka perolehan suaranya rendah.
5. Laki-laki sekalipun yang ketiga sumberdayanya rendah maka perolehan suaranya rendah.

Tabel 4. Modal Sosial, Ekonomi, Politik Laki-Laki dan Perempuan Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1 Provinsi Lampung, Pemilu 2019

No Urut	Jenis Kelamin	Jumlah Suara	Modal Politik			Modal Ekonomi			Modal Sosial		
			X1	X2	X3	X1	X2	X3	X1	X2	X3
1	L	4352	√			√			√		
2	L	1269		√		√			√		
3	P	667			√			√			√
4	L	2033			√		√			√	
10	P	128			√			√			√
11	L	814			√	√			√		

Sumber Data: KPU Provinsi Lampung, diolah 2023  
 Keterangan: X1 tinggi, X2 sedang; X3 rendah

Berdasarkan data pada table di atas diperoleh beberapa variasi tinggi rendahnya modalitas perempuan dan laki-laki di PKB. Perempuan dan laki-laki sama-sama rendah modalitas politiknya. Modalitas ekonomi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sedangkan modalitas sosial laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Data menunjukkan bahwa di PKB ada kecenderungan:

1. Calon yang memiliki 3 modal dalam kategori tinggi akan memperoleh suara tinggi
2. Calon laki-laki yang modal politiknya rendah, namun modal ekonomi dan sosial tinggi, maka perolehan suaranya rendah.
3. Calon yang modal sosial dan ekonomi tinggi namun modal politiknya sedang maka perolehan suaranya cukup tinggi.
4. Perempuan yang modal politiknya rendah, sosialnya rendah, dan ekonominya rendah, maka perolehan suaranya rendah.
5. Pada umumnya, baik perempuan dan laki-laki yang modal politik, ekonomi, sosialnya rendah maka perolehan suaranya rendah.

Tabel 5. Modal Sosial, Ekonomi, Politik Laki-Laki dan Perempuan Calon Anggota DPRD PDIP Dapil 1 Lampung 2019

No Urut	Jenis Kelamin	Jumlah Suara	Modal Politik			Modal Ekonomi			Modal Sosial		
			X1	X2	X3	X1	X2	X3	X1	X2	X3
1	P	86258	X			X			X		
2	P	4304	X			X			X		
3	L	2315				X			X		

4	L	4714				X			X		
5	P	13437	X				X		X		
6	L	1736				X			X		
7	L	3369	X				X		X		
8	L	558		X						X	
9	P	800			X	X					X
10	L	679			X			X			X
11	L	2518		X		X			X		

Sumber Data: KPU Provins Lampung, diolah 2023  
 Keterangan: X1 tinggi, X2 sedang; X3 rendah.

Di partai PDIP, modal politik perempuan lebih tinggi dari laki-laki, modalitas ekonomi dan social laki-laki dan perempuan hampir sebagian besar tinggi meskipun ada yang modal sosialnya sedang dan rendah. Mencermati tabel di atas, modal sosial perempuan dan laki-laki calon PDIP adalah sebagai berikut:

1. Calon yang modal politik, ekonomi, sosial tinggi, maka perolehan suaranya tinggi, walaupun perempuan.
2. Calon yang modal politik dan sosial tinggi, meskipun modal ekonomi sedang, suaranya tetap tinggi meskipun perempuan.
3. Calon yang laki-laki yang memiliki modal politiknya sedang, dan kedua modal ekonominya tinggi atau sedang, namun modal sosialnya tinggi maka perolehan suaranya agak tinggi.
4. Selama calon itu baik perempuan dan laki-laki modal politik, ekonomi, sosial rendah maka perolehan suaranya rendah.

Berdasarkan uraian di atas, perempuan yang menjadi calon anggota sudah tidak lagi berada di dalam hambatan psikologis dan budaya patriarkhi. Karena dalam kondisi modal politiknya masih lemah, sedang atau tinggi, sudah ada keberanian untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislative dan bertarung untuk memperebutkan suara. Dengan kata lain affirmative action telah berhasil membuat partai politik yang mayoritas dikuasai laki-laki di dalam kepengurusan (minimal 60% laki-laki: maksimal 30% perempuan) sehingga keputusannya berpihak kepada laki-laki dipaksa harus menurunkan maskulinitasnya. Regulasi *zipper system* yang mengatur susunan daftar calon dimana harus ada satu perempuan merupakan di setiap tiga calon bentuk gerakan perlawanan terhadap budaya patriarkhi. Regulasi ini memaksa partai politik harus membuka akses bagi perempuan untuk menjadi

calon. Bagi perempuan terbukanya akses ini menjadikannya memiliki control atas pencalonannya misalnya perempuan bernegosiasi tentang biaya pencalonan ditanggung partai politik. Penempatan perempuan dan laki-laki pada nomor urut kecil memang masih menjadi perebutan antar calon karena ada anggapan nomor urut kecil memberikan peluang besar untuk terpilih. Namun, perempuan cenderung berada di nomor bawah atau besar. Namun *zipper system* terbukti menempatkan perempuan pada nomor kecil 1, 2, atau 3, yang biasanya ditempati laki-laki, namun di dalam zipper system harus ada perempuannya.

Kelemahan perempuan di modal ekonomi merupakan realitas yang semakin sulit dihadapi perempuan (juga oleh laki-laki). Karena politik semakin pragmatis, atau dalam istilah demokrasi telah terjual (Aspinall & Berenschot, 2019). Pragmatisme ini menyulitkan perempuan yang mencalonkan (dicalonkan) namun modal ekonominya masih rendah. Bahkan perempuan yang memiliki modal ekonomi juga berfikir realistis tentang strategi pemenangan yang harus ditempuh dalam memenangkan pertempuran. Bagi perempuan yang secara ekonomi tergantung pada laki-laki akan berfikir keras apabila larut dalam pragmatism politik. Sehingga calon perempuan cenderung tidak larut dalam strategi pertarungan model ini. Kecuali bagi perempuan yang memang telah mempersiapkan modal ekonomi. Publik pemilih yang semakin pragmatis ini menjadi problem baru saat perempuan sedang diafirmasi. Fenomena lain adalah nepotisme dalam pemilihan yang melibatkan istri atau suami, dan anak, dan semuanya berhasil memenangkan pertarungan juga merupakan problem keterpilihan perempuan yang modal ekonominya terbatas. Menguatnya fenomena nepotisme dalam pencalonan dan pemenangan seperti suami istri dan anak mencalonkan dalam satu daerah pemilihan. Tren ini akan menjadi hambatan bagi perempuan-perempuan caleg yang sumberdaya social, ekonomi, dan politiknya rendah. Di Lampung seorang ketua partai menjadi anggota DPR demikian juga istrinya, dan anaknya menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Seorang wakil gubernur memiliki saudara menjadi anggota DPD. Seorang Bupati, istrinya ketua DPRD. Terpampang baleho yang berbunyi “calon anggota DPR, anak kandung mantan Walikota”. Nepotisme, merupakan modal politik dan social yang potensial bagi keterpilihan anggota

legislative. Seorang anggota legislative berkomentar, nepotisme membuat biaya politik pelaku nepotisme rendah, namun menjadi berat bagi yang lain.

Kelemahan perempuan di modal social merupakan problem berat yang dihadapi perempuan. Karena modal social itu tidak dapat ditingkatkan secara instan kecuali ada tim sukses yang membranding calon. Padahal modal social seperti aktif di banyak organisas kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi olah raga, seni, budaya akan membuat perempuan dikenal public. Selain itu, dalam keterbatasan ekonomi, modal social akan meringankan beban ekonomi karena untuk menjangkau public dapat menggunakan jaringan social. Laki-laki lebih diuntungkan karena memiliki kebebasan lebih besar untuk berada di dalam banyak organisasi social kemasyarakatan, keagamaan, olah raga, seni, dan sebagainya, yang semuanya terkait dengan ketersediaan waktu luang. Laki-laki juga diuntungkan karena dalam konteks masyarakat patriarkhi laki-laki adalah pemimpin. Sehingga lebih bisa membangun hubungan patron-klien. (Nastain & Nugroho, 2022). Hubungan-hubungan ini terbukti berpengaruh pada pemberian suara klien kepada patron. Bagi perempuan, waktu luang tidak banyak tersedia karena perempuan berperan ganda (Purnomo, 2019). Sehingga perempuan terbatas untuk menginvestasikan dirinya pada aktivitas di berbagai organisasi non politik. Akibatnya perempuan tidak terlatih berbicara, memimpin, tidak mampu mengatur laki-laki, serta tidak memiliki jaringan berpengaruh untuk mendapatkan suara (Putri & Fatmariza, 2020).

Rendahnya modalitas perempuan bukan karena takdir. Karena banyak politisi yang berhasil menjadi anggota legislative. Bila takdir pasti ada keseragaman perilaku perempuan di dalam politik. Artinya bukan aspek biologis yang membuat perempuan rendah partisipasinya dalam politik. Hal ini lebih karena aspek nurture seperti sosialisasi atau pembiasaan politik, budaya politik. Seorang anggota DPRD Provinsi Lampung menjelaskan bahwa keterpilihannya sebagai anggota DPRD karena pembiasaan dirinya dalam berbagai aktivitas organisasi, berkumpul dengan para politisi, diskusi-diskusi politik, mengurus problem masyarakat. Problem biologis seperti melahirkan, menyusui, dapat dilakukan secara bersamaan dengan aktivitas- aktivitas kemasyarakatan. Problem relasi dengan suami, secara perlahan dibiasakan untuk bersinergi dalam mengurus keluarga. Dengan kondisi ini,

dukungan suami juga mengalir pada saat istri berkampanye ke tempat yang terpencil. Dukungan suami membuat istri percaya diri, nyaman, bersemangat

Menyediakan modal politik, social, ekonomi idealnya merupakan kebutuhan partai politik sebagai peserta pemilu. Namun dalam realitasnya para calon bekerja sendiri untuk memperoleh suara melakukan aktivitas blusukan sendiri. Hal ini akibat sistem proporsional terbuka yang membuat partai politik tidak fungsional dalam pemenangan calon. Para calon tidak mau terikat pada partai politik dalam pemenangan dan lebih suka menggunakan tim sukses informal non-partai. (Hartono, 2019). Jejaring informal berperan dalam pembentukan tim sukses yang sangat potensial untuk pencarian suara. (Tawakkal et al., 2020)

Perempuan-perempuan calon anggota legislative yang kalah di dalam meraih kemenangan sesungguhnya merupakan perempuan yang berani melawan arus budaya patriarkhi. Dalam kondisi penuh kesadaran bahwa modal keterpilihannya rendah namun keberanian mencalonkan diri merupakan bentuk kemampuan perempuan untuk terlibat dalam politik. Perempuan yang terlibat sebagai calon merupakan sedikit perempuan yang berhasil menghilangkan hambatan psikologis, social, budaya bahwa perempuan itu tidak cocok berpolitik. Perempuan dengan sedikit modal ini juga telah berhasil mengesampingkan kepesimisannya untuk menang karena dirinya perempuan yang sulit melawan laki-laki yang lebih kuat dalam politik.

Berdasarkan data penelitian, perempuan tidak selalu kalah namun ada yang menang. Laki-laki juga tidak selalu menang, tetapi ada yang kalah. Hal ini menunjukkan bahwa bukan karena jenis kelamin yang membuat kemenangan dan kekalahan. Juga bukan karena nilai-nilai budaya yang membuat perempuan mengalami kekalahan dalam pertarungan perebutan suara. namun karena modalitas dalam pertarungan terutama modal politik, ekonomi dan social.

## SIMPULAN

Budaya patriarkhi memang realitas yang menghambat perempuan di dalam berpolitik. Namun peningkatan IPG merupakan salah satu infrastruktur yang dapat meningkatkan wawasan perempuan untuk realistis dalam mengambil keputusan termasuk di dalam ranah politik. Selain itu, *affirmative action* telah menjadi jalan

bagi terbukanya ruang bagi perempuan untuk berada di daftar calon lebih banyak (minimal 30%). Memang masih ada hambatan bagi keterpilihan perempuan sebagai anggota legislative, namun tidak disebabkan hambatan psikologis, social, budaya. Hambatan dalam keterpilihan merupakan hambatan yang sama dengan calon laki-laki yaitu modal social, ekonomi dan politik. Apabila ketiga modal tersebut tidak ada atau rendah maka tingkat keterpilihan bagi laki-kali dan perempuan juga rendah. Bagi perempuan yang telah menjadi calon, meskipun kalah tetap bermakna yaitu sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya patriarkhi. Kepesertaannya sebagai calon telah membuktikan keberaniannya melawan hambatan psikologis, social dan kultural. Kesadaran tentang hal ini penting bagi perlawanan yang selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, N., Ubaidillah, A., & Sulhan, M. (2021). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam. *Urnal Pendidikan Islam*, 3(02), 229–242. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131>
- Ainul Luthfia, A. F., Diana, N. Z., & Yulianti, Y. (2021). Beban Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Soka Gunungkidul: Pandangan Feminis Dan Islam. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 10– 20. <https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.19223>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. books.google.com. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qvqTDwAAQBAJ&oi=fndpg=PR8&dq=klientelisme+dalam+politik&ots=GSsTTj0zBx&sig=\\_FnCo8WXih11XFTc-lBIjIVInQ4](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qvqTDwAAQBAJ&oi=fndpg=PR8&dq=klientelisme+dalam+politik&ots=GSsTTj0zBx&sig=_FnCo8WXih11XFTc-lBIjIVInQ4)
- Astuti, D. (2022). Transformasi Peran Domestik dan Peran Peran Berbasis Gender Publik Dalam Persepsi Masyarakat di Yogyakarta. *Partisipatoris*, 4(1). file:///C:/Users/USER/Documents/disertasi/dwi astuti.htm
- Boro, V. I. A., & Kale, A. E. T. (2020). Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu

- Legislatif 2014. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 115–130.  
<https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.115-130>
- Dewi, E. (2013). Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika. *Jurnal Substantia*, 15(2), 145–167.
- Fauziyah, I. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam 1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Ida Fauziyah. XII*, 1–18.
- Hartono, R. (2019). Politik Klientelisme di Indonesia. *Detik.Com*.  
<https://news.detik.com/kolom/d-4595885/politik-klientelisme-di-indonesia>
- Islam Ats-Tsauri, F. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 9(2), 106–132. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Yuridis*, 6(2), 55–72.  
<file:///C:/Users/USER/Downloads/rosalia,+3.+Anifatul+Kiftiah.pdf>
- Laia, M., Kusmanto, H., & Warjio, W. (2021). Pengaruh Politik Uang dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019. *Perspektif*, 10(2), 416–423.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4602>
- Marsella, W., & Afrizal, S. (2022). Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.26418/skjpi.v2i2.54785>
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Feminisme: Perspektif Islam Kontemporer. *Wahana Akademika*, 15(2).  
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/540/487>
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167–184.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/41083>
- Nuraini, S. (2019). Al-Quran dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis. *Hermeneutik*, 12(1), 71. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i1.6023>

- Pratiwi, H. A., & Wiyanti, E. (2017). Representasi Kesetaraan Gender pada Iklan (Tinjauan Semiotika Citra Laki-Laki dalam Keluarga pada Iklan Televisi). *Jurnal Desain*, 4(03), 212. <https://doi.org/10.30998/jurnaldesain.v4i03.1634>
- Purnomo, A. (2019). Teori Peran Laki-laki dan Perempuan. *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(1). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1705648&val=18521&title=HARAKAH DAN KEMANDIRIAN PEREMPUAN>
- Puspitarini, D., & Femilia, P. S. (2018). Kata Kunci : Relasi Gender , Kehidupan Sosial Ekonomi , Buruh Tani Perempuan. *An-Nisa'*, 2(2), 117–144. <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/annisa/article/view/778/623>
- Putri, N., & Fatmariza, F. (2020). Perempuan dan Kepemimpinan di Organisasi Mahasiswa Universitas Negeri Padang. *Journal of Civic Education*, 3(3), 267–276. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.378>
- Saputra, A. B., Setiawan, A., & ... (2021). Gender-Equality Concerns and Political Attitudes toward Women in the 2019 Legislative Election: Evidence from Pelalawan. In ... *Sosial dan Ilmu Politik*. [pdfs.semanticscholar.org. https://pdfs.semanticscholar.org/0e78/2efc9d0a0ccc04284ab11523fa3afb842893.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/0e78/2efc9d0a0ccc04284ab11523fa3afb842893.pdf)
- Shintya, S. (2009). “Laki-laki Pun Bisa”: Kesetaraan Gender dalam Iklan. *Jurnal Alayasastra*, 5(1). <file:///C:/Users/USER/Documents/disertasi/sintya.htm>
- Sulastri, R. (2020). Hambatan dan Tantangan Perempuan Anggota Legislatif Pasca Affirmative Action. *Khasanah Multidisiplin*, 1(2), 137–155. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/10361/4952>
- Syafputri, E. (2017). Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. *Global South Review*, 1(2), 165. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839>
- Talaohu, A. R. (2022). Analisis Tingkat Pendidikan Formal Dan Partisipasi Politik Masyarakat Dusun Nasiri Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian. *BERTERKUNDE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1, 1–15. <https://unidar.e-journal.id/best/article/view/116/97>

- Taufik, M. (2018). Faktor Penghambat Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan: Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Besar. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 24–30.  
<https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1072>
- Tawakkal, G. T. I., Damayanti, R., Subekti, T., & ... (2020). Jejaring Sosial Dalam Pembentukan Tim Sukses Mandiri Di Pemilu Dprd Kabupaten 2019. *Wacana Politik*.scholar.archive.org.  
<https://scholar.archive.org/work/idlbqm5zuncxnnlg6xlgulkk2u/access/wayba ck/http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/download/25654/pdf>